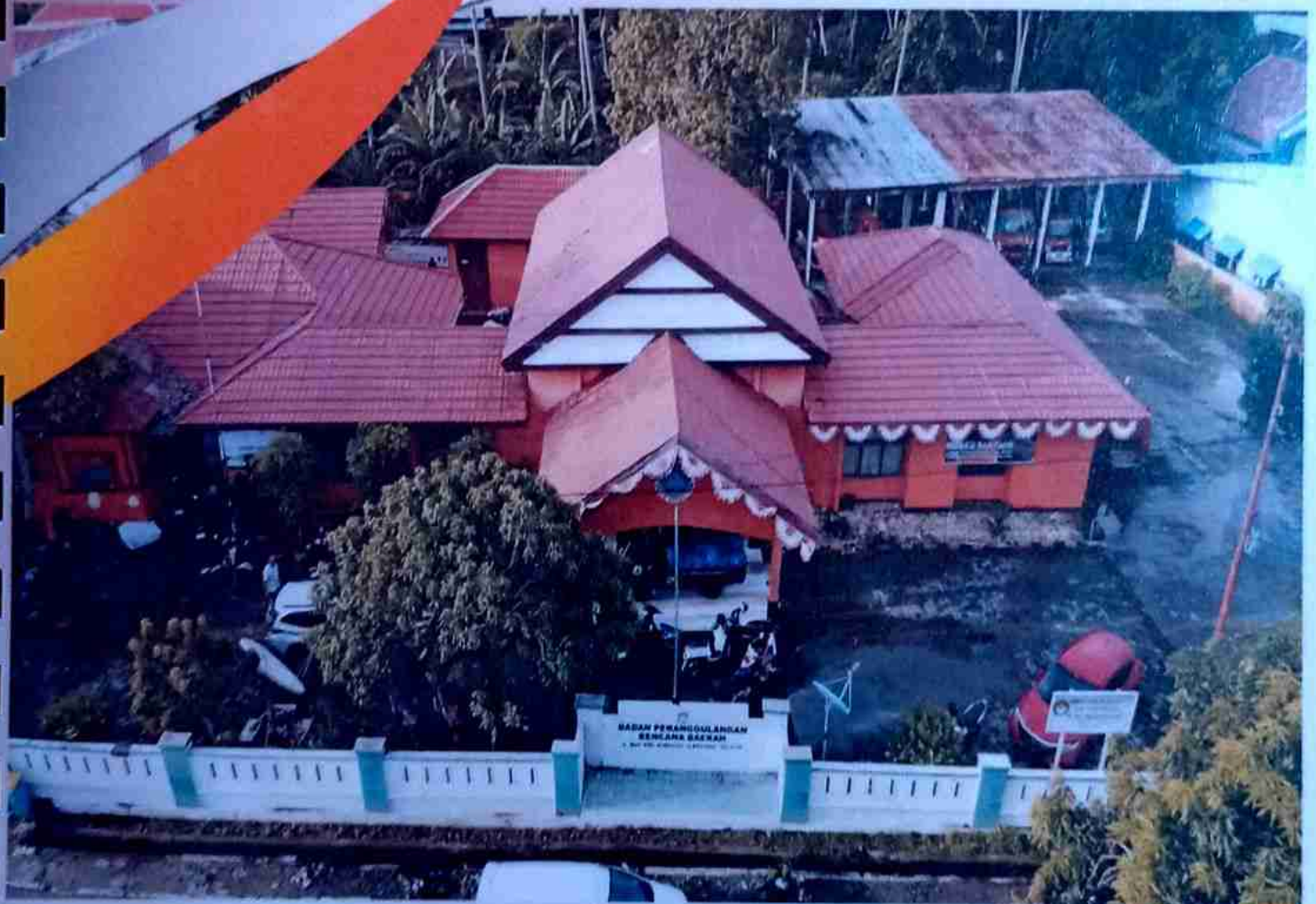




LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

TAHUN 2024

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah laporan pertanggungjawaban kinerja bagi setiap SKPD di Kabupaten Kepulauan Selayar.

LPPD ini disusun mengacu pada Pedoman Penyusunan LPPD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Pemerintahan Daerah, sebagai salah satu komponen laporan pertanggungjawaban yang diharapkan dapat menggambarkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selama tahun anggaran 2024.

Dengan tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami hingga tersusunnya LPPD Tahun 2024, semoga bermanfaat dan berguna untuk pelaksanaan tugas-tugas dan semakin memacu kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan datang. Namun kami menyadari dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan pendapat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini dimasa yang akan datang.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ini disusun dengan harapan dapat menjadi salah satu acuan dalam penyusunan LPPD Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Benteng, 24 Januari 2025

**KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,**



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar

Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19700726 199101 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Perangkat Daerah	2
1.3. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	4
1.4. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Gol. Jumlah Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional	18
BAB II : CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN	
URUSAN PEMERINTAHAN	
2.1. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	24
2.2. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Outcome</i>)	27
2.3. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	28
BAB III : CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS	
PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	45

BAB IV : PENUTUP

4.1. Kesimpulan	46
4.2. Saran	47

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Jumlah ketersediaan SDM (ASN dan PHL) BPBD Kab.Kep.Selayar Tahun 2024.....	18
Tabel 1.2	Jumlah pegawai yang telah mengikuti Pelatihan penjenjangan Thn.2024.....	19
Tabel 1.3	Jumlah pegawai berdasarkan golongan Tahun 2024.....	20
Tabel 1.4	Jumlah pegawai yang menduduki Eselon dan Fungsional Tahun 2024.....	22
Tabel 2.1.	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	24
Tabel. 2.2.	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Outcome</i>)	27
Tabel. 2.3.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dan selanjutnya diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Pemerintahan Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) wajib disusun oleh Kepala Daerah dan disampaikan kepada pemerintah pusat setiap tahunnya untuk menggambarkan hasil pelaksanaan urusan pemerintahan selama satu tahun anggaran.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan dokumen penting bagi pemerintah daerah yang berfungsi sebagai sarana akuntabilitas, evaluasi, dan pelaporan kinerja pemerintah daerah. LPPD adalah instrumen penting yang mencerminkan keberhasilan atau tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, proses penyusunannya harus dilakukan secara komprehensif, terintegrasi, dan melibatkan seluruh komponen pemerintahan daerah. Penyusunan LPPD dapat berkontribusi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel

Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan sub bidang urusan penanggulangan bencana perlu menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) karena LPPD merupakan dokumen penting yang berfungsi sebagai akuntabilitas,

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024**

evaluasi dan pelaporan capaian kinerja pemerintah daerah dan LPPD merupakan alat evaluasi untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah di masa yang akan datang. Evaluasi kinerja dilakukan secara menyeluruh, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.

Sehubungan dengan hal tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar diwajibkan untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai sarana evaluasi pelaporan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran.

1.2. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Kondisi geografis, geologi, hidrologis, dan demografis wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar berimplikasi pada kemunculan potensi kerawanan terhadap bencana yang tinggi, selain itu seiring dengan berjalannya waktu dan munculnya globalisasi yang telah mengakibatkan terkikisnya nilai-nilai luhur budaya masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat berkontribusi terhadap munculnya potensi konflik sosial (bencana non alam).

Pada umumnya bencana alam meliputi bencana akibat fenomena geologi (gempa bumi, tsunami, gerakan tanah dan letusan gunung api), bencana akibat kondisi hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin kencang, gelombang laut ekstrim), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, dan penyakit

tanaman/ternak), serta kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir dan pencemaran bahan kimia), bencana akibat ulah manusia lebih disebabkan karena konflik antar manusia (konflik sosial).

Penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Kepulauan Selayar diupayakan bergeser dari upaya-upaya responsif menuju arah preventif dengan membuka ruang serta waktu seluas-luasnya bagi keterlibatan inklusi masyarakat sebagai penerima manfaat. Pergeseran tersebut bergerak mengikuti laju semangan kesetaraan gender, non partisan yang berkeadilan. Usaha untuk mewujudkan perubahan paradigma tersebut menjadi sebuah harapan pengurangan risiko bencana dan atau peningkatan kapasitas ketahanan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menghadapi bencana.

Arah kebijakan pengurangan risiko bencana dilaksanakan dengan secara terpadu antara upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dengan didukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak, sehingga mampu mensinergikan upaya pengurangan risiko bencana hingga menembus ke lapisan-lapisan masyarakat. Dengan demikian menjadi harapan kita semua bahwa penanggulangan bencana dapat dilaksanakan dengan berbagai kegiatan, dengan sasaran yang jelas dan indikator yang terukur (kuantitatif/kualitatif). Untuk itulah Rencana Strategis BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar ini dirumuskan, sehingga kebijakan, strategi, program dan kegiatan

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024



dikonstruksikan atas tujuan, sasaran dan indikator yang realistis sebagai komitmen dukungan terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Selayar dalam sektor penanggulangan bencana 5 (lima) tahun mendatang.

Kantor BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) beralamat di Jln. Muh. Karaeng Bonto No. 30 Benteng Kab. Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan (92812), dengan titik Koordinat (-6.116118,120.464084).
Email :bpbd.kepulauanselayarkab@gmail.com

1.3. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi OPD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 142 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021, mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana dan sekaligus mempunyai fungsi pengordinasian, pengkomandoan dan pelaksana dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala Pelaksana Badan
- 2) Sekretariat, meliputi :
 - a. Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan
 - c. Subbagian Keuangan

- 3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- 4) Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- 5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Rincian tugas, fungsi dan uraian tugas jabatan struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

1) Kepala Pelaksana Badan

Kepala Pelaksana Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Kepala Pelaksana Badan dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang penanggulangan bencana daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi badan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Badan meliputi :

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

- ✦ Menyusun rencana kerja Badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- ✦ Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- ✦ Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- ✦ Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah Badan;
- ✦ Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- ✦ Merumuskan kebijakan urusan pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ✦ Menyelenggarakan kebijakan urusan pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ✦ Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ✦ Menyelenggarakan pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
- ✦ Menyelenggarakan pengelolaan keuangan;
- ✦ Mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- ✦ Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- ✦ Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024**

- ✦ Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Pelaksana Badan dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ✦ Menyelenggarakan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran Badan Penanggulangan Bencana;
- b. Pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. Pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan asset, dan dokumentasi;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup badan;
- e. Pelaksanaan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan badan penanggulangan bencana daerah;

- f. Pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
- g. Pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kinerja badan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
 - Subbagian Umum, Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.
 - Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja.
 - Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.

Uraian tugas Sekretaris meliputi :

- ✚ Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- ✚ Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024**

- ✦ Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- ✦ Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah badan;
- ✦ Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- ✦ Melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran badan penanggulangan bencana daerah;
- ✦ Melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- ✦ Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan asset, dan dokumentasi;
- ✦ Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup badan;
- ✦ Melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana daerah;
- ✦ melaksanakan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
- ✦ melaksanakan penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi kinerja Badan;
- ✦ mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam lingkup Badan;

- ✦ melaksanakan perencanaan dan evaluasi kinerja Badan;
- ✦ mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- ✦ melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- ✦ menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✦ menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ✦ melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi ;

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pencegahan dan ke siapsiagaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024**

d. Pelaksanaan administrasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

Uraian tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, meliputi :

- ✦ menyusun rencana kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- ✦ mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- ✦ memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- ✦ menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah badan;
- ✦ mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- ✦ merumuskan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan pemantapan penanggulangan bencana;
- ✦ melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana;
- ✦ melaksanakan evaluasi kegiatan penanggulangan bencana;
- ✦ mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- ✦ melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024**

- ✦ menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✦ menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesisapsiagaan dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ✦ melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4) Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik Dipimpin oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik yang mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kedaruratan dan logistik.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kedaruratan dan logistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang kedaruratan dan logistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kedaruratan dan logistik;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang kedaruratan dan logistik.

Uraian tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik meliputi :

- ✚ menyusun rencana kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- ✚ mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- ✚ memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- ✚ menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah badan;
- ✚ mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- ✚ merumuskan rencana dan pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana daerah;
- ✚ melaksanakan tanggap kedaruratan dan logistik;
- ✚ mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik;
- ✚ melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- ✚ menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✚ menyusun laporan pelaksanaan tugas kepala bidang kedaruratan dan logistik dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ✚ melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024**

5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Uraian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, meliputi :

- ✚ menyusun rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- ✚ mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- ✚ memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- ✚ menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
- ✚ mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024**

- ✦ merumuskan rencana dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- ✦ melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana;
- ✦ melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- ✦ mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- ✦ melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- ✦ menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✦ menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ✦ melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6) Kelompok Jabatan Fungsional

Pada Badan dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

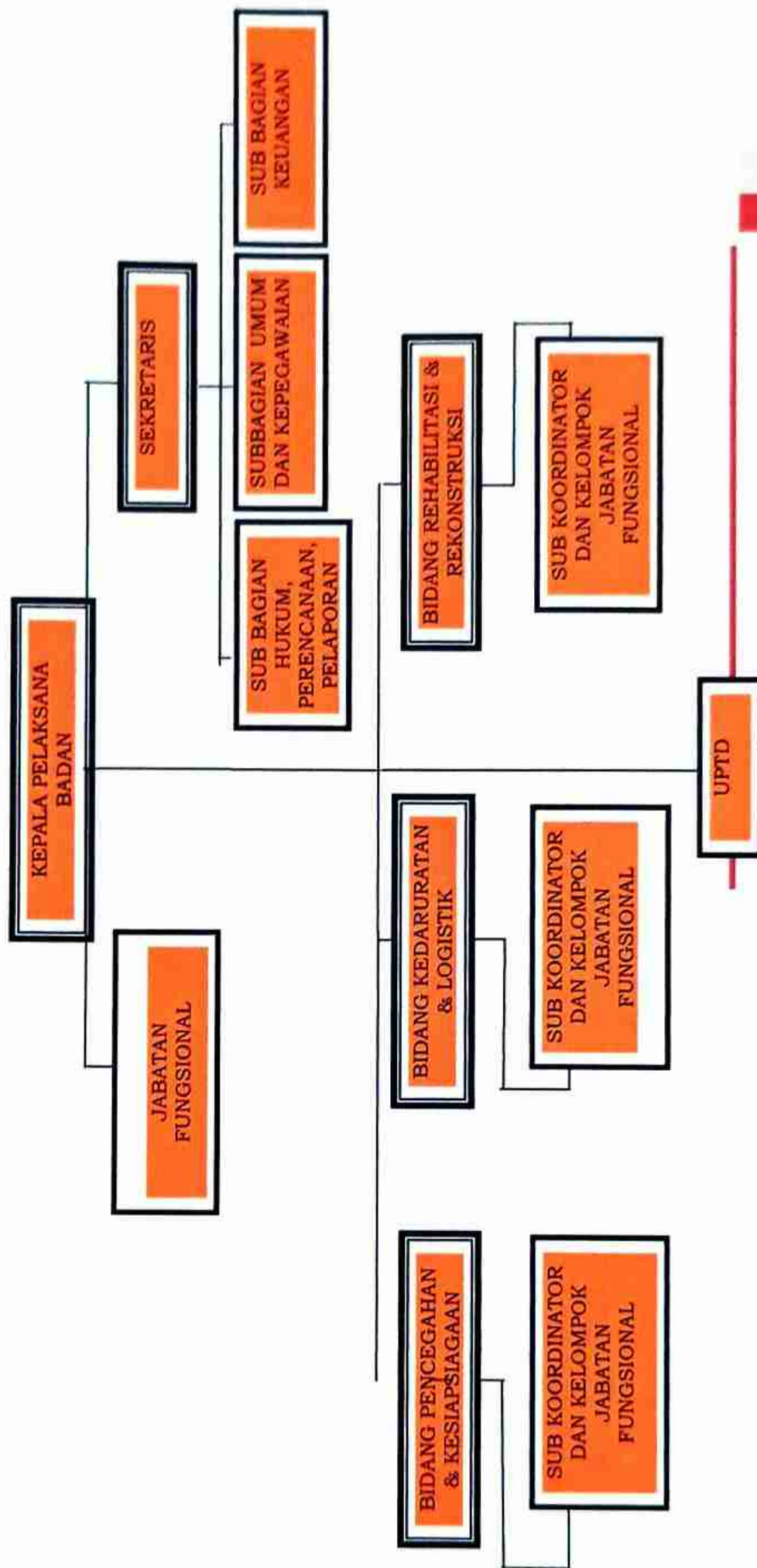
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing masing berdasarkan ketentuan

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024**

peraturan perundang-undangan.

1. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
2. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh sub koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing masing.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

1.4. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengedepankan profesionalisme yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan sebagai pondasi utama dalam upaya untuk mencapai tujuan dimana potensi yang dimilikinya diarahkan untuk merealisasikan Visi dan Misi antara lain :

1. Jumlah ketersediaan SDM (ASN dan PHL) BPBD Kab.Kep. Selayar

Tabel 1.1. Potensi Sumber Daya Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Pangkat / Gol.	Jumlah	Pendidikan	Keterangan
1.	Pembina Utama Madya	1 Orang	S2	Kepala Pelaksana
2.	Pembina Tk. I	1 Orang	S2	Sekretaris
3.	Pembina	2 Orang	S1, S2	Kabid. / Kasubag.
4.	Penata TK. I	6 Orang	S1/S2	Kabid./Kasubag./Fungsional Tertentu
5.	Penata Muda Tk. I	3 Orang	S1/S2	Fungsional Pelaksana
6.	Penata Muda	2 Orang	S1/SMA	Fungsional Pelaksana
7.	Pengatur Tk I	1 Orang	SMA	Fungsional Pelaksana
8.	Pengatur	1 Orang	SMA	Fungsional Pelaksana
9.	PPPK/IX	2 Orang	S1	Penata PB Ahli Pertama
10.	-	71 Orang	S1, DII, SMA	Pegawai Harian Lepas (PHL)
Jumlah		90 orang		

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2024.

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024



Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya aparatur belum cukup memadai dengan total pegawai sebanyak 90 orang, melihat kenyataan yang ada di lapangan masih membutuhkan aparatur yang memiliki kemampuan / skill yang secara teknis mampu menyikapi persoalan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dinilai semakin kompleks.

2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No.	Nama Pelatihan Penjenjangan	Jumlah
1	2	3
1	ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM TK. IV	5 Orang
2	SPAMA/ DIKLATPIM TK. III	1 Orang
3	SPAMEN/DIKLATPIM TK. II	1 Orang
Jumlah		7 Orang

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2024.

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024**

PELATIHAN PERJEJANGAN PEGAWAI



Berdasarkan tabel 1.2 di atas, menunjukkan bahwa sumber daya aparatur yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan masih 7 orang atau sekitar 70 % dari total pejabat sebanyak 10 orang pada lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

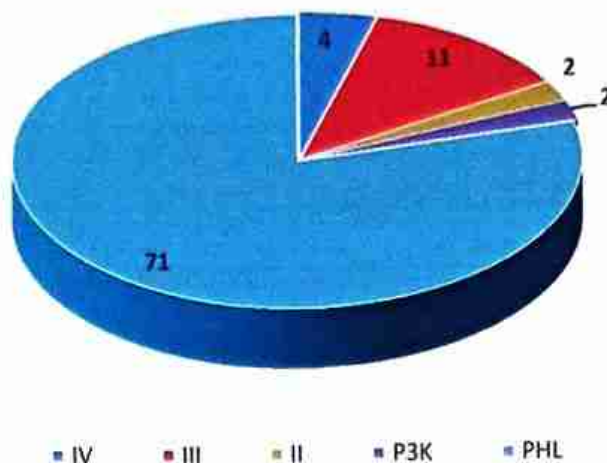
3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1	2	3
1	IV	4 Orang
2	III	11 Orang
3	II	2 Orang
4	PPPK	2 Orang
5	PHL	71 Orang
Jumlah		90 Orang

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2024.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan



Berdasarkan tabel 1.3 di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 8 jabatan struktural dengan golongan ruang IV dan III, dan terdapat pula jabatan fungsional tertentu sebanyak 2 orang dengan golongan ruang III, dan golongan ruang II terdapat 2 orang ASN, dan terdapat 2 orang PPPK dengan golongan ruang IX, serta Pekerja Harian Lepas (PHL) sebanyak 71 orang dengan total ASN dan PHL sebanyak 90 orang pada lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar.

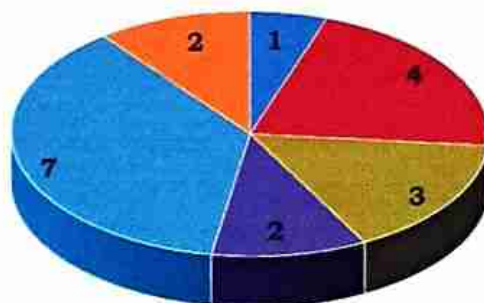
4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Fungsional

Tabel 1.4. Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Fungsional

No.	Jabatan	Jumlah
1	2	3
1	Eselon II	1 Orang
2	Eselon III	4 Orang
3	Eselon IV	3 Orang
4	Fungsional Tertentu	2 Orang
5	Fungsional Pelaksana	7 Orang
6	PPPK	2 Orang
Jumlah		19 Orang

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2024.

JUMLAH PEGAWAI YANG MENDUDUKI JABATAN



- Eselon II
- Eselon III
- Eselon IV
- Fungsional Tertentu
- Fungsional Pelaksana
- P3K

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024**

Berdasarkan 1.4 tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 1 orang yang menduduki jabatan eselon II sebagai Kepala Pelaksana BPBD, dan terdapat 4 orang yang menduduki jabatan eselon III sebagai Sekretaris dan Kepala Bidang, dan terdapat 3 orang yang menduduki jabatan eselon IV sebagai Kasubag, dan 2 orang dengan jabatan Fungsional Tertentu dan 7 Orang dengan jabatan Fungsional Pelaksana dan 2 orang dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sehingga total ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 19 orang.

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN2.1 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan
Indikator Kinerja Kunci Keluaran/Output

No.	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah							
		1	Persentase penyelesaian dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal		1 dokumen	100%		Penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2023-2028 dan telah disusun di tahun 2023
		2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana : $\frac{142.100}{142.100} \times 100\%$ 142.100 Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	142.100 142.100	100 %	Dokumentasi	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

		3	Persentase penyelesaian dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sampai dinyatakan sah/legal					Tidak adanya kegiatan ini dikarenakan tidak adanya anggaran untuk kegiatan tersebut
		4	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal					Tidak adanya kegiatan ini dikarenakan tidak adanya anggaran untuk kegiatan tersebut
		5	Persentase jumlah aparatur yang ikut pelatihan	2 Orang			Sertifikat/ Dokumen tasi pada saat pelatihan	Pelatihan teknis bidang kebencanaan
		6	Persentase warga negara dan ikut pelatihan					Tidak adanya kegiatan ini dikarenakan tidak adanya anggaran untuk kegiatan tersebut
		7	Persentase warga negara yang mendapatkan layanan Pusdalops penanggulangan bencana dan prasarana penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang mendapat layanan Pusdalops $\frac{1.080}{1.080} \times 100\%$	$\frac{1.080}{1.080}$	100%	Dokumen tasi	
		8	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					Tidak adanya kegiatan ini dikarenakan tidak adanya anggaran untuk kegiatan tersebut

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

		9	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas					Tidak adanya Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit/wabah zoonosis prioritas di tahun 2024
		10	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan status darurat bencana $\frac{2}{2} \times 100\%$	$\frac{2}{2}$	100 %	Dokumen SK Penetapan Tanggapan Tanggap Darurat Bencana Thn 2024	
		11	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana $\frac{131}{131} \times 100\%$	$\frac{131}{131}$	100%	Dokumen SK Bupati Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Kab.Kep. Selayar	
		12	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Jumlah Korban yang berhasil dicari, ditolong dan di evakuasi $\frac{51}{100} \times 100\%$ Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana sesuai jenis ancaman	$\frac{51}{100}$	51%	Dokumentasi	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

2.2. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Hasil (Outcome)

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PENANGGULANGAN BENCANA							
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah							
		1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana :}}{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan}} \times 100\%$	$\frac{4.894}{4.894} \times 100$	100%	Dokumentasi	
		2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	$\frac{24.514}{24.514} \times 100$	100 %	Dokumentasi	
		3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	$\frac{\text{Jumlah warga negara memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana}} \times 100\%$	$\frac{1.080}{1.080} \times 100$	100 %	Dokumentasi	

2.3. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024 terdiri dari 2 Program 12 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

A. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	7.900.000,-	7.861.900,-	0
Output	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	
Outcome	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	99,52%	

Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	5.872.000,-	5.835.200,-	0
Output	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	
Outcome	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	99,37%	

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024**

Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	5.872.000,-	5.800.400,-	0
Output	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	
Outcome	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	98,78 %	

Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	5.872.000,-	5.806.800,-	0
Output	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	
Outcome	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	98,89 %	

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024**

Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	5.872.000,-	5.758.200,-	0
Output	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	
Outcome	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	98,06%	

Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	7.750.000,-	7.619.500,-	0
Output	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	
Outcome	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	98,32 %	

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024**

Evaluasi kinerja perangkat daerah				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	12.694.000,-	12.675.200,-	0
Output	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan	4 Laporan	
Outcome	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	99,85 %	

2. Administrasi keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan gaji dan tunjangan ASN				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	2.048.862.000,-	1.903.463.504,-	0
Output	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	
Outcome	Persentase pengembangan sistem pelaporan keuangan	100%	92,90 %	

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024**

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	14.342.000,-	14.282.500,-	0
Output	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	
Outcome	Persentase pengembangan sistem pelaporan keuangan	100%	99,59 %	

Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	7.308.000,-	7.229.000,-	0
Output	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	1 dokumen	
Outcom	Persentase pengembangan sistem pelaporan keuangan	100%	98,92%	

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024**



3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	5.000.000,-	4.254.300,-	0
Output	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD	12 laporan	12 laporan	
Outcome	Persentase Administrasi barang milik daerah yang tersedia	100 %	85,09%	

4. Administrasi kepegawaian perangkat daerah

Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	123.706.000,-	123.687.925,-	0
Output	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 orang	7 orang	
Outcome	Persentase peningkatan kompetensi teknis pegawai	100 %	99,99 %	

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024**



5. Administrasi umum perangkat daerah

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	6.401.000,-	6.399.800,-	0
Output	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	
Outcome	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang dapat dipenuhi	100 %	99,98 %	

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	16.032.700,-	16.032.700,-	0
Output	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	
Outcome	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang dapat dipenuhi	100 %	100%	

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024**

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	5.000.000,-	5.000.000,-	0
Output	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	
Outcome	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang dapat dipenuhi	100 %	100%	

Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	467.053.500,-	466.998.720,-	0
Output	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	
Outcome	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang dapat dipenuhi	100 %	99,99 %	

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024**

6. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Pengadaan Mebel				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	44.018.000,-	36.748.000,-	0
Output	Jumlah paket mebel yang di sediakan	40 unit	40 unit	
Outcome	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100 %	83,48 %	

Pengadaan peralatan dan mesin lainnya				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	30.500.000,-	30.087.000,-	0
Output	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	3 unit	3 unit	
Outcome	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100 %	98,65 %	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024



7. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	111.020.000,-	110.713.248,-	0
Output	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	
Outcome	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100 %	99,72%	

Penyediaan jasa pelayanan umum kantor				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	338.497.100,-	337.562.800,-	0
Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	
Outcome	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100 %	99,72 %	

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024**

8. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	40.130.000,-	40.044.900,-	0
Output	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	1 unit	
Outcome	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100 %	99,79%	

Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	137.870.000,-	136.685.340,-	0
Output	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinanya	23 unit	23 unit	
Outcome	Persentase pemeliharaan barang milik	100 %	99,14%	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

	daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia			
--	--	--	--	--

Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	31.030.000,-	31.030.000,-	0
Output	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	20 Unit	20 unit	
Outcome	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100%	100 %	

Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	59.580.000,-	59.580.000,-	0
Output	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	
Outcome	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100%	100 %	

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024**



A. Program Penanggulangan Bencana**1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota**

Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten / kota (per jenis bencana)				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	90.985.000,-	90.826.400,-	0
Output	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 Tahun	100 Orang	100 Orang	
Outcome	Persentase penanganan korban darurat bencana	100 %	99,83%	

2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	102.655.000,-	100.672.800,-	0
Output	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	2 Kawasan	2 Kawasan	
Outcome	Persentase penanganan korban darurat bencana	100%	98,07%	

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024**



Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	35.000.000,-	34.763.184,-	0
Output	Jumlah Personil yang dikembangkan Kapasitas teknis dan manajerialnya	5 orang	5 orang	
Outcome	Persentase penanganan korban darurat bencana	100%	99,32%	

Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/Kota				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	156.354.000,-	156.308.132,-	0
Output	Jumlah Kegiatan Penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) kabupaten/kota yang tertangani	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
Outcome	Persentase penanganan korban darurat bencana	100%	99,97%	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024



3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Respon cepat penanganan darurat bencana Kabupaten / Kota				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	10.100.000,-	9.955.300,-	0
Output	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	1 Dokumen	1 Dokumen	
Outcome	Persentase penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	99,55 %	

Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	37.490.000,-	36.984.900,-	0
Output	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	30 orang	30 Orang	
Outcome	Persentase penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	98,65%	

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024**

**Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Kabupaten / Kota**

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	98.456.000,-	98.323.500,-	0
Output	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	30 Orang	30 Orang	
Outcome	Persentase penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	99,87%	

Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	221.939.300,-	221.781.932,-	0
Output	Jumlah laporan pelaksanaan Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana kabupaten/kota	1 Laporan	1 Laporan	
Outcome	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	99,93%	

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024**



4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	40.000.000,-	39.914.500,-	0
Output	Jumlah data dan informasi kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	
Outcome	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanganan Bencana	100%	99,79%	

Penanganan Pascabencana Kabupaten/kota				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	250.000.000,-	249.830.400,-	0
Output	Jumlah Penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) provinsi yang dilegalkan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
Outcome	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanganan Bencana	100%	99,93%	

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024**

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024**



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Sebagai lembaga yang sudah berdiri selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun, eksistensi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mengemban tugas sebagai pelaksana penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana disadari belum memberikan arti signifikan dan maksimal dalam pelayanan kepada masyarakat, dibanding dengan beban dan tanggung jawab dalam mengantisipasi, mengurangi, dan melaksanakan penanggulangan bencana daerah.

Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan anggaran dalam membiayai berbagai permasalahan mulai prabencana, tanggap darurat, hingga pasca bencana, dan faktor kualitas SDM yang ada masih sangat perlu ditingkatkan kapasitas/kemampuan/*skill* dalam menangani berbagai permasalahan kebencanaan yang sangat kompleks, baik pada tingkat kelembagaan daerah maupun masyarakat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024 dengan mengacu pada kewenangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan pelaksanaan asas desentralisasi, pengelolaan keuangan serta tugas umum pemerintahan.

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024**

Dari hasil kinerja yang dilaporkan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024, dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan yang telah dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan, pada umumnya dinilai berjalan dengan baik dan lancar.

Oleh karena itu, penanggulangan bencana pada tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar, seyogyanya bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah semata, namun menjadi tanggung jawab bersama pemerintah/*stakeholder*, dunia usaha dan masyarakat dalam rangka mengoptimalkan pencapaian kinerja di bidang penanggulangan bencana. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat menjadi salah satu perwujudan dari akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

4.2. Saran

Hasil pembangunan yang telah dicapai pada tahun 2024, tentunya masih perlu ditingkatkan lagi agar apa yang menjadi target dan sasaran pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 dapat dicapai dan dilaksanakan. Terhadap berbagai kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2024 akan dilakukan evaluasi untuk dijadikan acuan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun yang akan datang.

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024**

Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat menjadi salah satu perwujudan dari akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah dan menjadi bahan bagi pemerintah pusat dan pemerintah propinsi untuk memberikan catatan sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan pelaksanaan pemerintahan kedepannya. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat menjadi salah satu perwujudan dari akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Benteng, 24 Januari 2025

**KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,**



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar

Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19700726 199101 1 002

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024**

